



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB.MAGETAN TAHUN
2024 – 2026**

Jalan Tri Pandita No. 17 Magetan

Telp. 0351 – 895049 Fax. 0351.895049

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas limpahan Rahmat-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 dapat tersusun.

Dengan berakhirnya masa periode RPJMD Kabupaten Magetan 2018 – 2023, sedangkan PILKADA serentak baru dilaksanakan 24 November 2024 merujuk pada Inmendagri 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan perencanaan pembangunan perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024 – 2026 dan penyusunan Rencana Strategis Renstra tahun 2024 – 2026 bagi perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama 3 tahun ke depan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang. Di dalam Renstra ini merumuskan Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan.

Semoga dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan bagi sektor Perindustrian, Perdagangan, di Kabupaten Magetan sampai dengan 3(tiga) tahun kedepan.

Magetan,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN


SUCIPTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2.	Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024–2026..	51
3.2.	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	51
3.3.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.4.	Penentuan Isu – Isu Strategis	583
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	60
4.2	Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah	60
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	
6.1	Matrik Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	66
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII:	PENUTUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selama tahun 2024 sampai dengan 2026.

Renstra Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada Instruksi MENDAGRI RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dengan ini, Renstra Tahun 2024-2026 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai pengungkit ekonomi melalui sektor Perindustrian dan Perdagangan, dan mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan memiliki potensi yang cukup besar di bidang Industri kecil dan industri rumah tangga, karena disadari atau tidak industri kecil dan industri rumah tangga banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu keberadaannya harus terus di dukung dengan membantu mengurangi faktor penghambat pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga. Selama ini sektor industri yang memiliki prospek bagus antara lain : kerajinan alas kaki/kulit, kerajinan bamboo dan produk makanan olahan. Pada sektor perdagangan Pemerintah Kabupaten Magetan terus berupaya membantu para pengusaha dengan memperlancar arus barang dan jasa untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi. Bagi pelaku usaha perdagangan pembangunan fasilitas perdagangan meliputi sarana prasarana pasar daerah dan penataan tempat pedagang kaki lima, sebagai penunjang kenyamanan dan kelancaran dalam proses jual beli

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Kabupaten Magetan masuk di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan prioritas pembangunan antara lain:

- ✓Pembukaan interchange Tol ruas Ngawi - Madiun di Kecamatan Kartoharjo;
- ✓Revitalisasi Kawasan Pariwisata Telaga Sarangan;
- ✓Pembangunan Kawasan Aneka Industri Kulit dan Pengolahan Limbahnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut Kabupaten Magetan harus segera mempersiapkan semua kebutuhan pendukung program prioritas RPJMN agar dapat terlaksana percepatan pertumbuhan perekonomian sehingga kabupaten Magetan tidak tertinggal dengan beberapa daerah lain sebagai Kabupaten terkecil ke dua dan paling barat di Jawa Timur.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di sesuaikan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut jelas berdampak dengan berubah struktur keuangan yang ada di daerah ditambah dengan adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam kepmendagri nomor 050-3708 sehingga perlu penyesuaian di dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
 22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 tentang

- Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
23. Peraturan Bupati No 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk 3 (tiga) tahun ke depan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang.

Sedangkan tujuan penyusunan Ranwal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah :

1. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan
2. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 3 tahun;
3. Menetapkan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 disusun menurut sistematika sbb :

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian, fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal. (misal dasar hukum tentang SOTK Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran)
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renstra Perangkat Daerah
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, (SPM, SDG'S, indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-8.35
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu - Isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. (tabel TC.25)
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang. (tabel TC.26)		
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif		
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD		
BAB VIII PENUTUP		
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

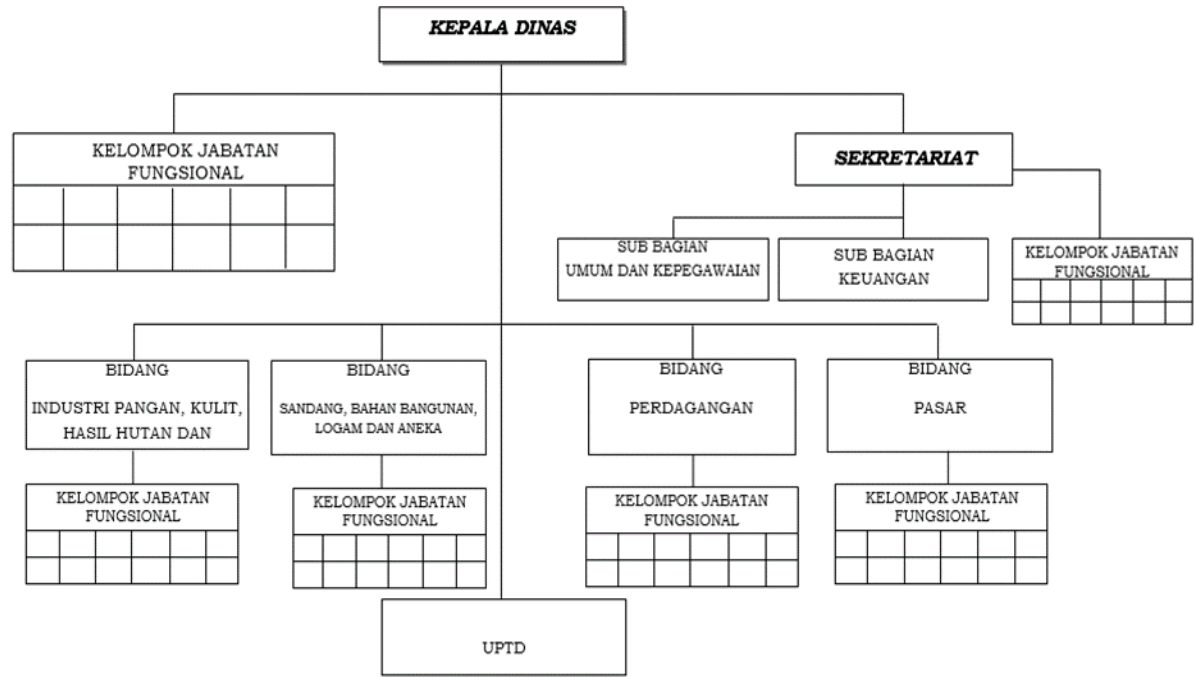
1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terbagi menjadi 4 Bidang yang masing-masing Bidang dipimpin oleh 1 orang kepala bidang.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat dilihat dibawah ini :

- a. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perdagangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pasar yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Keberadaan Aparatur sebagai lokomotif penggerak pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Magetan adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan informasi sebagai berikut :
Jumlah SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan berdasarkan status kepegawaian.

No	Status Kepegawaian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil	46	18	64
2	Tenaga Kontrak	86	26	112
	Jumlah	90	44	176

2. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar ;
- b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.;
- d. Pelaksanaan pemberian izin kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK), Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA), Perdagangan dan Pasar.;
- g. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran serta pengembangan kerja sama antar daerah dalam rangka peningkatan produksi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM); dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Tugas Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan serta rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang;
- i. pengoordinasian penyusunan program setiap bidang;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;
- g. mengurus kenaikan pangkat pegawai;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- i. mengurus kesejahteraan pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Tugas Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
- b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. menyelenggarakan tata usaha keuangan;
- d. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
- g. melaksanakan evaluasi anggaran; dan
- h. melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris

- (4) Tugas Sub Koordinator Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :
- a.merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan;
 - b.mengoordinasikan penyusunan program kegiatan;
 - c. melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
 - d.melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 - e.menyusun laporan hasil kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 5) Tugas Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan (IPKHK)
- Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :
- Penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang industri.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi :
- a.penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
 - b.pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
 - c.pelaksanaan fasilitasi penerbitan/ rekomendasi Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri;
 - d.pelaksanaan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan IKM dan sentra sentra industri;
 - e.pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
 - f.pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
 - g.pelaksanaan pembinaan SDM industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri;
 - h.pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan;
 - i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan; dan
 - j.pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Tugas Sub Koordinator Industri Pangan dan Kulit
- Sub Koordinator Pangan dan Kulit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :
- a.menyusun rencana kerja kegiatan di bidang pangan dan produk kulit;
 - b.melaksanakan koordinasi kegiatan bidang pangan dan produk kulit;
 - c.melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri pangan dan produk kulit;

- d.melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri pangan dan produk kulit;
 - e.melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri pangan dan kulit;
 - f.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri pangan dan produk kulit;
 - g.melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia industri dan aparatur industri pangan dan produk kulit;
 - h.melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri pangan dan produk kulit;
 - i.melakukan pembinaan dan penataan asosiasi industri pangan dan produk kulit;
 - j.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri pangan dan produk kulit; dan
 - k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Tugas Sub Koordinator Industri Hasil Hutan dan Kerajinan
- Sub Koordinator Hasil Hutan dan Kerajinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :
- a.menyusun rencana kerja kegiatan di bidang industri hasil hutan dan kerajinan;
 - b.melaksanakan koordinasi kegiatan bidang hasil hutan dan kerajinan;
 - c.melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri hasil hutan dan kerajinan;
 - d.melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri hasil hutan dan kerajinan;
 - e.melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri hasil hutan dan kerajinan;
 - f.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri hasil hutan dan kerajinan;
 - g.melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia industri dan aparatur industri hasil hutan dan kerajinan;
 - h.melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri hasil hutan dan kerajinan;
 - i.melakukan pembinaan dan penataan asosiasi industri hasil hutan dan kerajinan;
 - j.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil hutan dan kerajinan; dan
 - k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6) Tugas Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka (ISBLA)

Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan ijin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan/rekomendasi tanda daftar industri dan ijin usaha industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
- d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
- e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka;
- g. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, bahan bangunan, logam dan aneka; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Sub Koordinator Industri Sandang dan Aneka

Sub Koordinator Sandang dan Aneka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang sandang dan aneka;
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang sandang dan aneka;
- c. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri sandang dan aneka;
- d. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri sandang dan aneka;
- e. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang dan aneka;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri sandang dan aneka;
- g. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan aparatur industri sandang dan aneka;
- h. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri sandang dan aneka;

- i.melakukan pembinaan sumber daya manusia, industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang dan aneka;
- j.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri sandang dan aneka; dan
- k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Tugas Sub Koordinator Bahan Bangunan dan Logam

Sub Koordinator Bahan Bangunan dan Logam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

- a.menyusun rencana kerja kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam;
- b.melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang bahan bangunan dan logam;
- c.melaksnakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri bahan bangunan dan logam;
- d.melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra industri bahan bangunan dan logam;
- e.melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri bahan bangunan dan logam;
- f.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri bahan bangunan dan logam;
- g.melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia industri dan aparatur industri bahan bangunan dan logam;
- h.melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan kegiatan industri bahan bangunan dan logam;
- i.melakukan pembinaan sumber daya manusia, industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri industri bahan bangunan dan logam;
- j.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

7) Tugas Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan di bidang perdagangan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan, metrologi legal dan melaksanakan pengawasan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a.penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
- b.penyiapan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengembangan usaha perdagangan;
- c.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin perdagangan;

- d.pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi izin perdagangan;
- e.pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi distribusi barang;
- f.penyusunan database setiap jenis barang dan jasa;
- g.pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
- h.pelaksanaan fasilitasi distribusi barang produk;
- i.pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian metrologi legal dan sarana / prasarana;
- j.pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen ke pemerintah provinsi;dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan

Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

- a.menyusun rencana kerja kegiatan usaha perdagangan
- b.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perdagangan;
- c.melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi izin meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- d.melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- e.melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- f.melaksanakan pembinaan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha perdagangan;
- g.melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasar dan melaksanakan operasi pasar;
- h.melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida;
- i.melaksanakan pengawasan mutu dagangan kaki lima dan asongan;
- j.melaksanakan penyuluhan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan;
- k.melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah kelancaran distribusi perdagangan dan melaksanakan distribusi barang produk/pasar murah bersubsidi;
- l.melaksanakan fasilitasi proses penyelesaian sengketa konsumen ke pemerintah provinsi;
- m.melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- n.menyusun informasi database barang dan jasa;
- o.menyusun sistem dan jaringan informasi perdagangan;dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Tugas Sub Koordinator Promosi dan Kemitraan

Sub Koordinator Promosi dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

- a.menyusun rencana kegiatan promosi dan kemitraan;
- b.melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan promosi dan kemitraan;
- c.memfasilitasi usaha industri kecil menengah serta mempromosikan dan memasarkan hasil produk;
- d.menyusun profil produk hasil usaha industri kecil menengah;

- e.mengevaluasi terhadap hasil produk usaha industri kecil menengah sebagai dasar peningkatan mutu produk;
- f.melaksanakan pembinaan kepada usaha industri kecil menengah dalam pengembangan hasil produk;
- g.melaksanakan fasilitasi dalam angka pengembangan produk dan kegiatan temu usaha;
- h.menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan Promosi dan Kemitraan; dan
- i.menyusun rencana kegiatan kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah;
- j.melaksanakan koordinasi dalam rangka membangun kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah dalam bentuk temu usaha;
- k.melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kerjasama antara lembaga dengan usaha industri kecil menengah;
- l.melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha industri kecil menengah;
- m.melaksanakan evaluasi dan pengembangan kerjasama antara lembaga penyandang dana dengan usaha industri kecil menengah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8) Tugas Bidang Pasar

Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

Merumuskan kebijaksanaan, pembinaan, mengelola dan mengembangkan pasar daerah, menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat, menyediakan tempat untuk berjualan dan berbelanja, menyelenggarakan penarikan, pungutan retribusi, sewa dan jasa pasar lainnya, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a.penyusunan rencana kegiatan bidang pasar
- b.perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah, menyusun program dan kebijaksanaan teknis dan program kerja;
- c.pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah sesuai bidang tugas berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d.pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Tugas Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

- a.merencanakan, merumuskan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
- b.merencanakan, merumuskan perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
- c.melaksanakan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan pasar; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Tugas Sub Koordinator Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban Sub Koordinator Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas:
- a.menyusun rencana penerimaan retribusi, sewa los dan bedak pasar;
 - b.melaksanakan pembinaan teknis pemungutan;
 - c.meneliti dan memberikan pertimbangan ijin penggunaan tempat berjualan di kawasan pasar (surat keterangan penempatan hak tempat jualan (SKHPTJ));
 - d.membina dan mengendalikan ketertiban dan keamanan pedagang di dalam pasar;
 - e.melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan di dalam pasar dalam radius 200 m;
 - f.melakukan penyegelan dan pembukaan kembali bedak dan fasilitas pasar lainnya yang bermasalah setelah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g.menjaga dan mengawasi kebersihan, pemeliharaan dan perawatan bangunan beserta fasilitas lainnya di lingkungan pasar;
 - h.melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ke tempat penampungan sampah sementara; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 9) UPTD
Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

10) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6)Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (7)Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8)Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Susunan Kepegawaian yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan berdasarkan pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana/S2	Magister Hukum	1 orang
2	Pasca Sarjana/S2	Magister Managemen	1 orang
3	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	1 orang
4	Pasca Sarjana/S2	Magister Managemen Teknik	1 orang
5	Sarjana/S1	Ekonomi	9 orang
6	Sarjana/S1	Ilmu Administrasi Publik	1 orang
7	Sarjana/S1	Teknik Industri	5 orang
8	Sarjana/S1	Sosial	8 orang
9	Sarjana/S1	Hukum	1 orang
10	Sarjana/S1	Teknik Elektro	1 orang
11	Sarjana/S1	SSTP	1 orang
12	Sarjana/S1	Administrasi Negara	1 orang
13	Ahli Madya/D3	Akademi Kesehatan Lingkungan	1 orang
14	Ahli Madya/D3	Teknik Mesin	1 orang
15	Ahli Madya/D3	Teknik Kulit	1 orang
16	SMK	Akuntansi	2 orang
17	SMK	Administrasi	3 orang
18	STM	Mesin	2 orang
19	SMA	IPA	7 orang
20	SMA	IPS	11 orang
21	SLTP	-	5 orang
			64 orang

Sedangkan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat Struktural.

	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM II	1	
2.	Diklat PIM III	2	
3.	Diklat PIM IV	7	
	Jumlah	10	

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	
5	Pembina (IV/a)	4	
6	Panata Tingkat I (III/d)	9	
7	Penata (III/c)	6	
8	Panata Muda Tingkat I (III/b)	5	
9	Penata Muda (III/a)	16	
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	14	
11	Pengatur (II/c)	1	
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	5	
13	Pengatur Muda (II/a)	1	
14	Juru Tingkat I (I/d)	2	
15	Juru (I/c)	-	
Jumlah		64	

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :

	Tingkatan Eselon	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	4	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Eselon IV	2	Kepala Seksi
4	Pejabat Fungsional	7	JFT Penyetaraan
4	Staf	50	
Jumlah		64	

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan profesional. Demikian pentingnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Magetan.

Tanpa Itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

a. Sarana

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	6 unit
2.	Kendaraan Roda 3	15 unit
3.	Kendaraan Roda 2	13 unit
4.	Gerobak Sampah	4 unit
5.	Lemari Penyimpan	4 buah
6.	Mesin Ketik Elektrik	17 buah
7.	PC Unit	21 unit
8.	Laptop	24 buah
9.	Printer	31 buah
10.	Camera Digital	3 buah
11.	Filling Kabinet	42 buah
12.	Lemari	7 buah
13.	Meja Kerja	63 buah
14.	Kursi Kerja	60 buah
15.	Meja Komputer	4 buah

1. Prasarana

Prasarana yang dikuasai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan :

b.1. 17 Pasar Daerah

- ▶ Pasar Baru Magetan
- ▶ Pasar Sayur I Magetan
- ▶ Pasar Sayur II Magetan
- ▶ Pasar Wisata Plaosan
- ▶ Pasar Agrobis Plaosan
- ▶ Pasar Panekan
- ▶ Pasar Parang
- ▶ Pasar Gorang Gareng 1
- ▶ Pasar Gorang – Gareng 2
- ▶ Pasar Takeran
- ▶ Pasar Lembeyan
- ▶ Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati
- ▶ Pasar Manisrejo
- ▶ Pasar Mangge
- ▶ Pasar Maospati I
- ▶ Pasar Maospati II
- ▶ Pasar Tinap

b.2 6 Pasar Hewan

- ▶ Pasar Hewan Gorang Gareng
- ▶ Pasar Hewan Parang
- ▶ Pasar Hewan Plaosan
- ▶ Pasar Hewan Panekan
- ▶ Pasar Hewan Maospati
- ▶ Pasar Hewan Tebon

- b.3
1. Ex Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan (Jl. Kharya Dharma Magetan)
 - 2.Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan & Rumah Kemasan (Jl. Tri Pandita No. 17 Magetan)
 - 3.Kantor UPTD Metrologi Legal (Jl. Srikandi No. 1 Magetan)
 - 4.Rumah Promosi (Jl. Diponegoro No. 10 Magetan)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Bidang Industri

Pembangunan di sektor industri di dominasi oleh usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT). Hampir diseluruh kecamatan ada kegiatan industri tersebut. Meskipun kegiatan usaha ini tergolong kecil menengah, produk dari masing-masing jenis usaha kecil tetapi jumlah unit usaha cukup banyak sehingga merupakan potensi yang besar.

Unit usaha yang merupakan potensi yang besar antara lain penyamakan kulit, kerajinan kulit, kerajinan bambu, kerajinan genteng, kerajinan gamelan, kerajinan batik, dan makanan olahan.

Persentase IKM yang Difasilitasi Sertifikasi

Sertifikasi Industri Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kapasitas IKM dalam membuat produk sehingga disukai konsumen serta memiliki daya saing yang kuat di pasar dalam maupun luar negeri. Selain itu, adanya sertifikasi berguna untuk melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup (K3L).

Persentase IKM yang Difasilitasi Sertifikasi di Kabupaten Magetan

No	Persentase IKM yang bersertifikasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi	35	35	36	29	34
2.	Jumlah IKM	15.922	16.01	16.035	17.135	13.46
3.	Persentase	0,21	0,21	0,22	0,16	0,25

Pada tahun 2022, persentase IKM yang difasilitasi sertifikasi di Kabupaten Magetan adalah sebesar 0,25%. Melihat pentingnya IKM yang bersertifikasi, pemerintah Kabupaten Magetan saat ini sedang dalam upaya untuk meningkatkan jumlah IKM yang bersertifikasi.

Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan

Pertumbuhan industri kecil di Kabupaten Magetan pada tahun 2018-2022 masih relatif rendah dan mengalami penurunan, pada tahun 2021 dan mengalami penurunan dikarenakan terjadinya pandemic covid yang hal ini menyebabkan industry banyak yang gulung tikar. Dengan berakhirnya pandemic covid diharapkan kondisi perekonomian akan semakin stabil dan pada tahun- tahun berikutnya pertumbuhan industri kecil semakin naik terutama yang mendukung sektor pariwisata.

Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan Industri Kecil	%	0,16	0,58	0,12	0,06	0,07

Nilai Produksi Industri Kecil

Nilai produksi industri kecil di Kabupaten Magetan tahun 2018 sebesar Rp. 730.507.000.- terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 731.384.000.-

Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Produksi Industri Kecil	Rp.	729.243.000	730.507.000	731.384.000	731.384.000	760.639.000

2.3.2 Bidang Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta memberikan sumbangan yang sangat cukup dalam penerimaan pendapatan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan dapat memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan.

Dibawah ini disampaikan data perkembangan sektor Perdagangan :

Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor penting yang menunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Magetan, jumlah usaha perdagangan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui pertumbuhan usaha perdagangan di kabupaten Magetan. Pertumbuhan usaha perdagangan diperoleh dari jumlah usaha perdagangan tahun $n - (n-1)$ dibagi Jumlah Usaha Perdagangan Tahun $(n-1)$ dikalikan 100%. Berdasarkan data pada tahun 2018-2022 pertumbuhan usaha perdagangan adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7,06	7,13	12,28	2,57	3,04

Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5

Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5 di Kabupaten Magetan pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PK5 Yang Menempati Tempat Berjualan Khusus PK5	pedagang	82	110	205	192	408
2.	Jumlah PK5	pedagang	1.875	1.933	1.933	1,933	2,141
3.	Persentase PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5	%	4.38	5.78	10.6	9.9	9.7

Pendataan PK5 yang menempati tempat berjualan khusus PK5 mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 408 pedagang, pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima terus bertambah sehingga angka persentase jumlah PK5 yang menempati tempat khusus PK5 dan mendapatkan pembinaan terus meningkat. Dengan semakin banyaknya PK5 di tiap – tiap kecamatan maka diperlukan pendataan dan kerjasama dengan pemangku wewenang di tiap wilayah.

Jumlah Pelaksanaan Pameran

Pameran merupakan suatu kegiatan penyajian hasil karya sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Indikator pelaksanaan pameran merupakan jumlah yang menunjukkan banyaknya kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan per tahun. Berikut ini merupakan jumlah pelaksanaan pameran di Kabupaten Magetan.

Jumlah Pelaksanaan Pameran di Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pelaksanaan pameran	kali	15	16	9	5	12

Jumlah pelaksanaan pameran di Kabupaten Magetan selama lima tahun terakhir memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun awal, jumlah pelaksanaan 15 kali pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sebanyak 16 kali namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pameran mengalami penurunan menjadi 9 kali dan 5 kali, begitu pula pada tahun 2022 karena dampak pandemic jadi pelaksanaan pameran belum berjalan maksimal.

Produk UKM yang Masuk Pasar Modern

Di Kabupaten Magetan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 51 IKM yang masuk pasar modern digital, akan tetap ditargetkan pada periode RPJMD tahun 2024-2026.

Produk UKM yang masuk pasar modern

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Produk UKM yang masuk pasar modern	%	-	7	-	-	51

2.3.3 Bidang Pasar

Perdagangan merupakan kegiatan pembelian dan penjualan barang tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pedagang besar maupun pedagang kecil. Perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan daerah sehingga memiliki peran yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah. Dalam hal ini pasar daerah sangat berperan penting dalam proses perdagangan.

Persentase Pasar Kondisi Baik

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Persentase pasar dengan

Persentase Pasar Kondisi Baik Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022

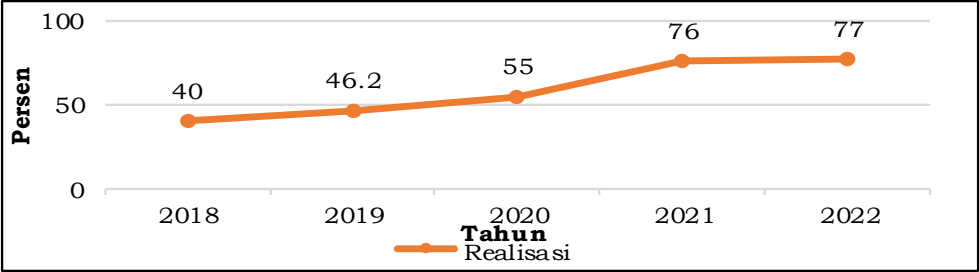
kondisi baik di Kabupaten Magetan sebagai berikut.

Persentase pasar dengan kondisi baik di Kabupaten Magetan untuk periode tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 persentase pasar dengan kondisi baik berada di angka 40%

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pasar Kondisi Baik	%	40	46.2	60	76	77

dan terus meningkat pada tiap tahunnya, hal ini merupakan upaya keberlangsungan peningkatan ekonomi di Kabupaten Magetan. Dan akan terus ditingkatkan untuk pasar menuju standart SNI.

Grafik Persentase Pasar Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Magetan Tahun 2018-2022



Sumber : Data Olahan, 2022

Rasio Ketersediaan Los/Bedak Di Pasar Daerah

Rasio Ketersediaan Los/Bedak Di Pasar Daerah di Kabupaten Magetan adalah perbandingan antara jumlah bedak/los yang tersedia dibandingkan dengan seluruh jumlah pedagang di pasar. Berdasarkan data yang tersaji dibawah ini baru tersedia mulai tahun 2019 karena pada tahun 2018 belum dilakukan pendataan pedagang.

Rasio Ketersediaan Los/Bedak di Pasar Daerah						
No.	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bedak/los kios yang tersedia	-	6078	6151	6266	6336
2	Jumlah seluruh pedagang di pasar	-	7151	7151	7151	7151
3	Rasio ketersediaan los/bedak di Pasar Daerah(%)	-	0,85	0,8602	0,8762	0,886

Selain rehabilitasi pasar daerah target pendapatan retribusi juga merupakan salah satu pendukung untuk pembangunan daerah.

Realisasi Retribusi

NO	Sumber/Unit Penghasil	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Rretribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.990.263.700	2.910.323.800	2.613.808.446	2.769.960.000	2.875.466.900
2	Retribusi pelayanan pasar - pelataran	122.819.400	120.230.000	81.224.000	86.850.000	88.470.000
3	Retribusi tempat khusus parkir pasar	1.018.719.000	1.012.130.000	855.839.000	929.584.000	923.524.000
4	Tera/tera ulang	86.985.000	120.049.500	73.327.500	80.534.000	101.049.000
	Jumlah	3.459.695.400	2,996,210,900	4.162.733.300	3.624.198.946	3.988.509.900

2.3.4 UPTD Metrologi

Persentase UTTP Bertanda Tera Sah

UTTP merupakan singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. UTTP adalah alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. UTTP membutuhkan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sahnya UTTP untuk dipergunakan.

Persentase UTTP Bertanda Tera Sah di Kabupaten Magetan

No	Persentase UTTP bertanda tera sah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UTTP yang ditera sah	UTTP	23.031	27.210	7.414	10.029	16.478

2	Jumlah UTTP di Kabupaten Magetan	UTTP	52.090	52.090	52.090	52.090	52.090
3	Persentase	%	44.21	52.23	14.23	19.25	31.63

Pada tahun 2018, persentase UTTP Bertanda Tera Sah di Kabupaten Magetan adalah sebesar 44,21%. Pada tahun – tahun berikutnya mengalami penurunan dan kenaikan yang fluktuatif. Melihat pentingnya UTTP Bertanda Tera Sah, pemerintah Kabupaten Magetan saat ini terus berupaya untuk meningkatkan jumlah UTTP Bertanda Tera Sah.

Tabel T-C 23																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan																			
No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Restra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdagangan																		
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan				2,088,786.17	2,198,490.29	2,308,194.41	2.308.194,41	2.417.898,53	2,200,293.70	2,904,518.50	2.197.659,3	2.318.350,39		105,4 %	132,11%	95%	95,88%	
	Persentase Pasar Kondisi Baik				50	55	60	70	75	46.2	60	76	77		92.40%	109.10%	126%	101%	
	Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah				0.84	0.86	0.88	0.89	0.91	0.85	0.86	0.87	0.886		101.10%	100%	101%	99.50%	
	Pertumbuhan Usaha Perdagangan				7.08	7.09	7.1	7.11	7.11	7.13	12.28	2.57	3.04		100.70%	173.20%	36%	42.75%	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Restra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya				5.4	6.3	7.1	7.9	8.3	5.78	10.6	9.9	9.7		107.03%	168.25%	139%	122%	
	Persentase Produk IKM yang Masuk Pasar Modern				10	20	23	28	32	7	0	0	51		70%	0%	0%	182%	
2	Perindustrian																		
	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan				0.175	0.18	0.185	0.19	0.2	0.58	0.12	0.03	0.07		331.42%	66.66%	16%	36.84%	
	Nilai Produksi industri kecil				730519253	731834189	733.834.189	734.581.140	736.050.300	730507000	731384000	731.834.686	760.639.000		99.99%	99.93%	99%	103%	

Berdasarkan Tabel T-C 23 untuk masing – masing indikator kinerja Disperindag Kabupaten Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Urusan Perdagangan

1. Nilai PDRB Sektor Perdagangan merupakan data dari BPS Kabupaten Magetan yang dihitung atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yaitu tentang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini bisa dilihat bahwa nilai PDRB Sektor Perdagangan dalam kurun waktu 2019 -2022 konstan dan stabil.
2. Persentase Pasar Kondisi Baik yaitu tingkat standarisasi pasar menuju SNI. Selama kurun waktu 2019 – 2023 Disperindag terus melakukan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana pasar daerah agar lebih rapi tertata bersih dan menuju standar SNI.
3. Rasio Ketersediaan los/bedak di pasar daerah merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan sarana tempat berdagang di pasar daerah untuk keberlangsungan penunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten Magetan;
4. Pertumbuhan Usaha Perdagangan merupakan jumlah usaha perdagangan yang sudah terdaftar, terjadinya penurunan tersebut akibat terjadinya pandemi covid yang berdampak pada usaha perdagangan yang gulung tikar.
5. Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya adalah pendataan dan penataan PK5 agar berdagang di tempat berjualan khusus atau telah ditentukan. Dari data terlihat stabil karena penataan PK5 dilakukan secara bertahap di tiap – tiap lokasi atau titik kumpul PK5.
6. Persentase produk IKM yang masuk pasar modern pada awal periode sudah terdapat produk IKM yang lolos masuk ke toko modern tapi karena pandemi covid terdapat beberapa produk yang tidak bisa bertahan dan keputusan dari manajemen toko modern tersebut untuk sementara tidak menerima produk dari luar daerah. Berbagai upaya terus kita lakukan termasuk mengadakan pelatihan maupun sosialisasi penjualan melalui market place sehingga berlalunya pandemi IKM juga sudah mulai bisa memasarkan produknya melalui market place.

Urusan Perindustrian

1. Pertumbuhan Industri Kecil terlihat sangat kecil hal ini dikarenakan banyaknya IKM pada saat terjadinya pandemi covid banyak yang gulung tikar. Berbagai upaya pendampingan juga telah kita lakukan termasuk mengikuti pada acara pelatihan market place bagi IKM agar mampu memasarkan produknya melalui toko digital.
2. Nilai Produksi Industri Kecil bersifat stabil dari tahun ke tahunnya.

Tabel T-C.24																		
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
KABUPATEN MAGETAN																		
No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	731,000,000	570,182,200	-	-	-	692,861,067	534,026,382	-	-	-	95%	94%	-	-	-	
	Kegiatan penyediaan jasa dan administrasi perkantoran	Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	566,000,000	475,182,200	-	-	-	528,189,208	439,486,438	-	-	-	93%	92%	-	-	-	
	Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas		165,000,000	95,000,000	-	-	-	164,671,859	94,539,944	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Ketersediaan Saranan dan Prasarana Aparatur	535,500,000	238,248,800	-	-	-	520,577,620	236,680,589	-	-	-	97%	99%	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	283,000,000	0	-	-	-	276,340,400	0	-	-	-	98%	0%	-	-	-	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	97,500,000	110,000,000	-	-	-	94,264,100	110,000,000	-	-	-	97%	100%	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan pasar	50,000,000	0	-	-	-	49,792,750	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	75,000,000	113,773,800	-	-	-	71,488,650	112,457,589	-	-	-	95%	99%	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	30,000,000	14,475,000	-	-	-	28,691,720	14,223,000	-	-	-	96%	98%	-	-	-	
	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor disperindag	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Program peningkatan disiplin aparatur		0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM PNS Disperindag	50,000,000	30,000,000	-	-	-	45,217,600	25,204,550	-	-	-	90%	84%	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kualitas SDM PNS Disperindag	30,000,000	5,000,000	-	-	-	29,996,350	1,492,550	-	-	-	100%	30%	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang - undangan		20,000,000	25,000,000	-	-	-	15,221,250	23,712,000	-	-	-	76%	95%	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan yang dibuat	29,500,000	40,000,000	-	-	-	27,711,500	35,846,500	-	-	-	94%	90%	-	-	-	
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	20,000,000	20,000,000	-	-	-	19,388,000	19,678,500	-	-	-	97%	98%	-	-	-	
	Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan money yang dibuat	9,500,000	20,000,000	-	-	-	8,323,500	16,168,000	-	-	-	88%	81%	-	-	-	
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	20,000,000	20,000,000	-	-	-	19,485,150	19,669,600	-	-	-	97%	98%	-	-	-	
	Survey IKM	Jumlah Survey IKM	20,000,000	20,000,000	-	-	-	19,485,150	19669600	-	-	-	97%	98%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka	-	-	10,280,612,906	9,498,629,129	9,666,770,420	-	-	8,543,094,797	8,918,987,543	-	-	-	83%	94%	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	30,000,000	25,000,000	50,161,000	-	-	29,686,000	22,565,000	-	-	-	99%	90%	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	-	-	23,000,000	15,000,000	20,000,000	-	-	22,726,000	12,615,000	-	-	-	99%	84%	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	-	-	7,000,000	10,000,000	30,161,000	-	-	6,960,000	9,950,000	-	-	-	99%	100%	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	6,239,606,906	5,790,248,829	6,011,459,420	-	-	5,208,382,823	5,618,468,019	-	-	-	83%	97%	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	-	-	3,500,000	5,000,000	5,500,000	-	-	3,444,000	4,881,850	-	-	-	98%	98%	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	6,236,106,906	5,785,248,829	6,005,959,420	-	-	5,204,938,823	5,613,586,169	-	-	-	83%	97%	-	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	531,715,000	635,938,300	476,520,000	-	-	521,858,100	524,927,195	-	-	-	98%	83%	-	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	-	-	20,000,000	20,000,000	22,000,000	-	-	18,799,000	17,161,600	-	-	-	94%	86%	-	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	-	-	511,715,000	615,938,300	454,520,000	-	-	503,059,100	507,765,595	-	-	-	98%	82%	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	1,390,000,000	55,000,000	39,000,000	-	-	1,081,693,600	37,291,660	-	-	-	78%	68%	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	-	-	10,000,000	20,000,000	22,000,000	-	-	8,875,000	9,870,300	-	-	-	89%	49%	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	-	-	1,380,000,000	35,000,000	17,000,000	-	-	1,072,818,600	27,421,360	-	-	-	78%	78%	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	405,653,000	776,500,000	453,200,000	-	-	389,963,908	583,278,758	-	-	-	96%	75%	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	36,000,000	40,000,000	35,400,000	-	-	35,400,000	31,975,000	-	-	-	98%	80%	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	25,000,000	28,000,000	27,500,000	-	-	24,905,700	23,672,900	-	-	-	100%	85%	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	19,600,000	25,000,000	21,600,000	-	-	19,600,000	19,971,000	-	-	-	100%	80%	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	20,000,000	25,000,000	29,700,000	-	-	19,400,000	25,000,000	-	-	-	97%	100%	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	-	-	174,053,000	443,500,000	172,000,000	-	-	165,094,100	293,155,300	-	-	-	95%	66%	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	11,000,000	15,000,000	17,000,000	-	-	11,000,000	14,600,000	-	-	-	100%	97%	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dan pelayanan perjalanan dinas	-	-	120,000,000	200,000,000	150,000,000	-	-	114,564,108	174,904,558	-	-	-	95%	87%	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	1,583,038,000	1,886,342,000	2,493,430,000	-	-	1,220,760,424	1,826,741,286	-	-	-	77%	97%	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	200,500,000	185,500,000	240,000,000	-	-	107,663,724	137,807,986	-	-	-	54%	74%	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	1,368,538,000	1,680,842,000	2,231,430,000	-	-	1,100,850,000	1,675,540,000	-	-	-	80%	100%	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara	-	-	14,000,000	20,000,000	22,000,000	-	-	12,246,700	13,393,300	-	-	-	87%	67%	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	100,600,000	329,600,000	143,000,000	-	-	90,749,942	305,715,625	-	-	-	90%	93%	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	45,000,000	45,000,000	50,000,000	-	-	42,139,342	40,944,200	-	-	-	94%	91%	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	55,600,000	34,600,000	33,000,000	-	-	48,610,600	27,183,300	-	-	-	87%	79%	-	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	200,000,000	40,000,000	-	-	-	193,718,125	-	-	-	-	97%	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	50,000,000	20,000,000	-	-	-	43,870,000	-	-	-	-	88%	-	
7	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	230,000,000	3,787,886,500	-	-	-	222,029,512	2,878,637,200	-	-	-	6%	76%	-	-	-	
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah KUB yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan ujicoba produk	230,000,000	495,886,500	-	-	-	222,029,512	341,380,650	-	-	-	97%	69%	-	-	-	
	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang dibina	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Revitalisasi sentra IKM		0	3,292,000,000	-	-	-	0	2,537,256,550	-	-	-	0%	77%	-	-	-	
8	Program pembinaan industri	Jumlah kelompok tani tembakau yang menjalin kemitraan dengan pabrik rokok	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Pengembangan industri tembakau dan kadar tar dan nktin rendah melalui penerapan GM P	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
9	Program pembinaan lingkungan sosial	Jumlah kelompok alih profesi yang dibina	1,325,000,000	900,000,000	-	-	-	1,287,788,200	842,428,696	-	-	-	97%	94%	-	-	-	
	Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui bantuan modal dan sarana produksi	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Diklat dan bantuan mesin peralatan produksi	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat		675,000,000	500,000,000	-	-	-	646,492,400	481,552,050	-	-	-	96%	96%	-	-	-	
	Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi	430,000,000	150,000,000	-	-	-	430,000,000	144,002,000	-	-	-	100%	96%	-	-	-	
	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat	Fasilitasi Pmeran produk kerajinan dan hasil pelatihan	220,000,000	150,000,000	-	-	-	211,295,800	132,440,000	-	-	-	96%	88%	-	-	-	
	Pemetaan industri hasil tembakau	Dokumen pemetaan	0	100,000,000	-	-	-	0	84,434,646	-	-	-	-	84%	-	-	-	
10	Program Penataan Struktur Industri	Terbangunnya Kawasan LIK II	100000000	50000000	-	-	-	34,469,194	34,320,000	-	-	-	34%	69%	-	-	-	
	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Terbangunnya Kawasan LIK II	100,000,000	50,000,000	-	-	-	34,469,194	34320000	-	-	-	34%	69%	-	-	-	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	-	-	5,635,534,000	4,291,391,000	1,651,540,000	-	-	4,559,344,556	4,146,136,429	-	-	-	81%	97%	-	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	-	-	5,635,534,000	4,291,391,000	1,651,540,000	-	-	4,559,344,556	4,146,136,429	-	-	-	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peralatan	-	-	916,600,000	-	-	-	-	909,268,650	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pengembangan tentang teknologi industri	-	-	-	125,000,000	265,000,000	-	-	-	122,168,100	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	-	-	918,564,000	1,509,500,000	653,270,000	-	-	913,524,606	1,440,602,199	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	-	-	3,800,370,000	2,611,891,000	683,270,000	-	-	2,736,551,300	2,539,836,430	-	-	-	-	-	-	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	-	-	0	45,000,000	50,000,000	-	-	0	43,529,700	-	-	-	-	-	-	
11	Program Pengembangan sentra sentra industri potensial	Tersedianya data dan peta potensi	40,000,000	0	-	-	-	33,941,300	0	-	-	-	85%	0%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra IKM potensial	40,000,000	0	-	-	-	33,941,300	0	-	-	-	85%	0%	-	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)	-	-	285,000,000	540,000,000	278,000,000	-	-	244,189,750	535,406,450	-	-	-	86%	99%	-	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	-	-	285,000,000	540,000,000	278,000,000	-	-	244,189,750	535,406,450	-	-	-	86%	99%	-	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	-	-	0	515,000,000	250,000,000	-	-	0	511,424,150	-	-	-	0%	99%	-	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	-	-	285,000,000	25,000,000	28,000,000	-	-	244,189,750	23,982,300	-	-	-	86%	96%	-	
12	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Prosentase peningkatan nilai produksi atas implementasi iptek sistem produksi	250,000,000	293,137,800	-	-	-	227,013,900	284,262,956	-	-	-	91%	97%	-	-	-	
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi		130,000,000	98,000,000	-	-	-	117,534,850	95,063,000	-	-	-	90%	97%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Uji limbah industri dan fasilitasi HAKI/merk, BPOM, Sertifikasi Halal	120,000,000	95,137,800	-	-	-	109,479,050	91,233,556	-	-	-	91%	96%	-	-	-	
	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Pembinaan dan bantuan mesin	0	100,000,000	-	-	-	0	97,966,400	-	-	-	0%	98%	-	-	-	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek	-	-	0	881,000,000	50,000,000	-	-	0	875,340,058	-	-	-			-	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota		-	-	0	881,000,000	50,000,000	-	-	0	875,340,058	-	-	-	0%	99%	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan design Kemasan	-	-	0	881,000,000	50,000,000	-	-	0	875,340,058	-	-	-	0%	99%	-	
13	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase IKM yang menerapkan teknologi produksi bersih, sehat dan ramah lingkungan	430,000,000	450,380,000	-	-	-	377,198,482	430,617,100	-	-	-	88%	96%	-	-	-	
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Diklat dan bantuan peralatan produksi	100,000,000	150,000,000	-	-	-	81,729,182	141,690,150	-	-	-	82%	94%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Diklat dan bantuan peralatan produksi	280,000,000	250,380,000	-	-	-	256,787,300	24,169,350	-	-	-	92%	97%	-	-	-	
	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Sosialisasi SNI	50,000,000	50,000,000	-	-	-	38,682,000	47,229,600	-	-	-	77%	94%	-	-	-	
14	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	PDRB sektor perdagangan	10,288,270,000	13,053,882,200	-	-	-	5,759,828,150	12,596,973,209	-	-	-	56%	96%	-	-	-	
		Terbangunnya pasar sayur magetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan pasar dan distrribusi barang/produk	Jumlah pedagang yang mengikuti bazaar murah dan pujasera	240,000,000	156,371,600	-	-	-	235,504,900	153,836,100	-	-	-	98%	98%	-	-	-	
	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah pedagang yang mengikuti pasar lelang dan fasilitasi pedagang melalui misi dagang	50,000,000	0	-	-	-	<u>46.711400</u>	0	-	-	-	93%	0%	-	-	-	
	Pendataan pedagang di pasar tradisional	Tersedianya data pedagang di pasar tradisional	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-			-	-	-	
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Monitoring harga sembako	20,000,000	25,000,000	-	-	-	18,448,400	24,895,000	-	-	-	92%	100%	-	-	-	
	Pemeliharaan gedung pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	0	200,000,000	-	-	-	0	193,276,940	-	-	-	0%	97%	-	-	-	
	Pembangunan pasar	Tersedianya pasar daerah yang representatif	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Rehabilitasi pasar	Rehabilitasi Pasar	6,600,000,000	7,850,455,500	-	-	-	4,936,681,372	7,169,740,919	-	-	-	75%	91%	-	-	-	
	Revitalisasi 8 pasar daerah	Revitalisasi pasar	1,648,270,000	727,939,000	-	-	-	64,904,704	683,519,065	-	-	-	4%	94%	-	-	-	
	Pembangunan Pasar Hewan	Pembangunan pasar hewan	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pasar Tradisional	Pembuatan dokumen lingkungan bagi pasar tradisional	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Temu usaha	30,000,000	0	-	-	-	24,850,750	0	-	-	-	83%	0%	-	-	-	
	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Promosi perdagangan/ pameran	450,000,000	400,000,000	-	-	-	432,726,624	400,000,000	-	-	-	96%	100%	-	-	-	
	Operasionalisasi pasar	0	1,250,000,000	1,474,116,100	-	-	-	0	1,292,363,750	-	-	-	0%	88%	-	-	-	
	Pemeliharaan pasar hewan	0	0	20,000,000	-	-	-	0	19,766,850	-	-	-	0%	99%	-	-	-	
	Rehabilitasi pasar DID	0	0	2,200,000,000	-	-	-	0	2,659,574,585	-	-	-	0%	121%	-	-	-	
	Peningkatan Sumberdaya Pasar Daerah	0	100,000,000	0	-	-	-	92,425,800	0	-	-	-	92%	0%	-	-	-	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	-	-	90,000,000	395,000,000	301,750,000	-	-	89,799,100	376,396,825	-	-	-	100%	95%	-	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/ persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/ jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	-	-	70,000,000	335,000,000	249,500,000	-	-	69,799,600	319,255,950	-	-	-	100%	95%	-	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah/ Jenis Barang yang dipantau	-	-	10,000,000	40,000,000	80,000,000	-	-	9,894,600	30,748,600	-	-	-	99%	77%	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	-	-	20,000,000	145,000,000	49,500,000	-	-	19,945,000	142,041,000	-	-	-	100%	98%	-	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	-	-	40,000,000	150,000,000	120,000,000	-	-	39,960,000	146,466,350	-	-	-	100%	98%	-	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	-	-	20,000,000	60,000,000	52,250,000	-	-	19,999,500	57,140,875	-	-	-	100%	95%	-	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah/ Jenis Barang yang dipantau	-	-	20,000,000	60,000,000	52,250,000	-	-	19,999,500	57,140,875	-	-	-	100%	95%	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran	-	-	0	250,000,000	120,000,000	-	-	0	207,904,050	-	-	-	#DIV/0!	83%	-	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	-	-	0	250,000,000	120,000,000	-	-	0	207,904,050	-	-	-	0%	83%	-	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	-	-	0	150,000,000	75,000,000	-	-	0	114,598,000	-	-	-	0%	76%	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan pameran	-	-	0	100,000,000	45,000,000	-	-	0	93,306,050	-	-	-	0%	93%	-	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan	-	-	65,000,000	450,000,000	238,500,000	-	-	64,496,000	412,159,900	-	-	-	99%	92%	-	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan	-	-	65,000,000	450,000,000	238,500,000	-	-	64,496,000	412,159,900	-	-	-	99%	92%	-	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	-	-	55,000,000	350,000,000	200,000,000	-	-	54,940,000	342,913,650	-	-	-	100%	98%	-	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang	-	-	10,000,000	100,000,000	38,500,000	-	-	9,556,000	69,246,250	-	-	-	96%	69%	-	
15	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
16	Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase barang dagang tidak sesuai ketentuan	2,147,500,000	414,060,000	-	-	-	1,957,909,702	397,140,140	-	-	-	91%	96%	-	-	-	
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan mamin kadaluarsa	100,000,000	100,000,000	-	-	-	77,038,850	97,292,050	-	-	-	77%	97%	-	-	-	
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah waji tera yang menera ulang UTTP nya	628,000,000	225,000,000	-	-	-	567,800,170	214,707,890	-	-	-	90%	95%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi	Pengawasan peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Biaya umum dan pendampingan DAK Perdagangan		150,000,000	0	-	-	-	132,630,682	0	-	-	-	88%	0%	-	-	-	
	Kegiatan Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	Jumlah Sarana dan Prasarana	1,269,500,000	89,060,000	-	-	-	1,180,440,000	85,140,200	-	-	-	93%	96%	-	-	-	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP Yang Ditera	-	-	85,000,000	400,000,000	200,000,000	-	-	84,835,050	398,290,652	-	-	-	100%	100%	-	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera	-	-	85,000,000	400,000,000	200,000,000	-	-	84,835,050	398,290,652	-	-	-	100%	100%	-	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera	-	-	85,000,000	310,000,000	125,000,000	-	-	84,835,050	308,791,542	-	-	-	100%	100%	-	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera	-	-	0	90,000,000	75,000,000	-	-	0	89,499,110	-	-	-	0%	99%	-	
17	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Cakupan PK5 yang dibina	90,000,000	193,575,750	-	-	-	83,305,250	190,818,050	-	-	-	93%	99%	-	-	-	
	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Penyuluhan terhadap pedagang kakilima	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-	-	
	Pendataan pedagang kakilima	Tersedianya data pedagang kakilima	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-	
	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Uji lab sample mamin	30,000,000	17500000	-	-	-	29,299,750	17010000	-	-	-	98%	97%	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Sosialisasai dan penyuluhan PK5	60,000,000	176,075,750	-	-	-	54,005,500	173,808,050	-	-	-	90%	99%	-	-	-	
18	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Monitoring rokok	100,000,000	100,000,000	-	-	-	95,085,400	95,398,450	-	-	-	95%	95%	-	-	-	
	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Monitoring rokok	100,000,000	100,000,000	-	-	-	95,085,400	95,398,450	-	-	-	95%	95%	-	-	-	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	-	-	9,281,468,944	12,208,368,550	6,085,810,000	-	-	8,316,839,900	11,579,695,752	-	-	-	90%	95%	-	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	-	-	9,245,374,944	11,565,868,550	5,591,675,000	-	-	8,280,745,900	11,058,761,152	-	-	-	90%	96%	-	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi dan dipelihara	-	-	8,631,599,944	9,771,718,550	4,756,000,000	-	-	7,683,222,200	9,300,127,101	-	-	-	89%	95%	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	-	-	613,775,000	1,794,150,000	835,675,000	-	-	597,523,700	1,758,634,051	-	-	-	97%	98%	-	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi	-	-	36,094,000	642,500,000	494,135,000	-	-	36,094,000	520,934,600	-	-	-	100%	81%	-	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan	-	-	36,094,000	642,500,000	494,135,000	-	-	36,094,000	520,934,600	-	-	-	100%	81%	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	-	-	-	100,000,000	88,500,000	-	-	-	98,708,250	-	-	-	-	99%	-	
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	-	-	-	50,000,000	38,500,000	-	-	-	49,908,000	-	-	-	-	100%	-	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	48,800,250	-	-	-	-	98%	-	

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja Disperindag tahun 2019-2022 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai dan akan terus diupayakan peningkatan melalui program dan kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- ✓Tingginya persaingan usaha (Kegiatan usaha hingga kini semakin maju, barang hasil produksi semakin beraneka ragam, desain yang bervariasi dan kualitas yang baik, Jika kegiatan usaha dimagetan perkembangannya lamban, maka hasil produk dari daerah lain maupun produk dari luar negeri menjadi persaingan yang besar , sampai dengan saat ini barang - barang dari luar daerah maupun dari luar negeri telah banyak masuk di daerah magetan dan laku pesat dipasaran.
- ✓Pesatnya persaingan teknologi industri (Teknologi industri semakin maju, sehingga bagi IKM yang masih menggunakan peralatan tradisonal akan ketinggalan dan barang produknya tidak laku dipasaran dan mengalami kegagalan)
- ✓Semakin maraknya penjualan lewat online atau sarana digital.

2.4.2Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

- ✓Adanya permintaan pasar yang cukup tinggi
- ✓Bahan baku yang berasal dari SDA yang cukup tersedia untuk diolah
- ✓Letak Kab. Magetan berada pada ujung barat Propinsi Jawa Timur dan sangat dekat dengan Propinsi Jawa Tengah
- ✓Meningkatnya industry pariwisata di kabupaten magetan menjadi peluang pasar bagi Industri Kecil.
- ✓Sudah Adanya Gedung UPTD Metrologi untuk pelayanan Tera / Tera Ulang bagi masyarakat.
- ✓Sudah Dibangunnya Gedung Rumah Kemasan dan Rumah Promosi yang dapat menunjang IKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

3.1.1 Perdagangan

3.1.1.1 Bidang Perdagangan

- 1) Munculnya PKL baru yang Berjualan Di Tempat yang Tidak Sesuai dengan Peruntukannya

Pertumbuhan daerah yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan banyak penduduk angkatan kerja beralih ke sektor informal. Salah satu usaha sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam perkembangannya, banyak PKL baru yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini kedepannya dapat menimbulkan efek domino apabila tidak dilakukan langkah antisipasi.

2. Masih Kurangnya Produk IKM yang Masuk Pasar Modern

Masuknya Industri Kecil dan Menengah ke pasar modern bertujuan agar produk IKM bisa dijual secara mudah dan meluas. Dengan masuknya IKM ke pasar modern diharapkan IKM dapat lebih siap menghadapi persaingan pasar bebas, mulai dari kualitas sampai dengan kreativitas dalam pengolahan produk. Pada tahun 2019 sudah ada 7 produk IKM yang masuk pasar modern, namun karena dampak pandemi pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat produk yang masuk pasar modern. Sehingga kedepannya perlu dilakukan inovasi ke pasar modern digital, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2022.

3. Masih kurangnya sarana promosi bagi Industri-industri kecil yang merupakan produk unggulan Kab. Magetan.

Produk unggulan merupakan produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Setelah kualitas produk sudah kompetitif akan tetapi masih ada permasalahan di pemasaran. Oleh karena itu, butuh lebih banyak sarana promosi untuk menghadapi persaingan global dengan mengadakan Ivent-ivent baik diadakan sendiri di intern Kabupaten Magetan atau mengikuti di daerah – daerah lain.

4. Diperlukannya pengawasan – pengawasan terhadap bahan berbahaya.

Pengawasan bahan – bahan berbahaya pada makanan masih sangat diperlukan agar terjaminnya keamanan konsumen.

5. Permasalahan dibidang perlindungan konsumen tingkat pemberdayaan konsumen masih rendah, dalam memperjuangkan dan memperoleh hak – haknya, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait keamanan produk yang masih rendah

3.1.1.2 Bidang Pasar

1. Meningkatnya transaksi perdagangan secara elektronik belum diimbangi dengan terlaksananya pengaturan terkait E- Commerce. Dalam euforia perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang semakin meningkat, penyerapan produk dalam negeri ikut terdongkrak. Saat ini terdapat sekitar empat juta UKM yang berhasil masuk ke market place (lapak online), dimana sebanyak 80 persen produk yang dijual adalah produk lokal. Pada penyelenggaraan hari belanja online nasional (Harbolnas) 2018, transaksi tercatat meningkat 44,7 persen dibandingkan pada 2017. Namun meningkatnya transaksi perdagangan secara elektronik belum diimbangi dengan terlaksananya pengaturan terkait seperti:
 - a. Penyelesaian regulasi dan tata kelola e-commerce bersinergi dengan Kemenkominfo dan kementerian/lembaga terkait, dengan tujuan melindungi kepentingan pelaku usaha nasional khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Pengamanan aktivitas perdagangan digital melalui pengawasan produk di e-commerce terkait SNI dan Label;
 - c. Penyiapan infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat;
2. Melemahnya volume perdagangan dunia, terutama yang terjadi pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian nasional, perlu adanya penguatan jaringan distribusi dan kapasitas logistic Perdagangan
3. Tingginya aliran produk impor ke dalam negeri, selain dapat memanjakan konsumen dengan banyaknya pilihan akan produk yang lebih beragam juga dapat memiliki potensi negatif terhadap konsumen. Adapun potensi negatif yaitu meningkatnya peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan di pasar domestik yang dapat mengancam perlindungan konsumen.
4. Belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan perlu dilakukan penataan system dan sarana distribusi perdagangan untuk mendorong efisiensi arus barang melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan termasuk pasar daerah.
5. Disparitas harga antar daerah
produk pangan pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi, ini merupakan akibat bottleneck dalam rantai pasok serta terbatasnya kapasitas bongkar/muat pelabuhan di beberapa daerah
6. Masih Kurangnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah dan Pasar Hewan di Kabupaten Magetan.
Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Keberadaan pasar erat kaitannya dengan perekonomian daerah. Pasar dengan akses sarana dan prasarana memadai tentu akan meningkatkan kinerjanya sehingga juga dapat berimbas kepada perekonomian daerah. Meskipun pasar memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah, saat ini infrastruktur sarana dan prasarana pasar daerah dan pasar hewan di Kabupaten Magetan dinilai masih kurang hal ini disebabkan belum adanya pasar daerah dengan .

3.1.1.2 UPTD Metrologi

1. Kurangnya Tenaga Penerima untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP
Tenaga Penerima di Disperindag baru ada 3 orang sedangkan harus melayani tera / tera ulang di 18 Kecamatan dan 17 Pasar Daerah di Wilayah Kabupaten Magetan serta pelayanan di kantor UPTD

- Metrologi. Hal tersebut menjadi kendala kurang maksimalnya pelayanan Tera / Tera Ulang yang berpengaruh pada target PAD.
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang UTTP wajib tera / tera ulang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 3. Belum adanya SDM Pengawas Kemetrologian dan Pengamat Tera yang akan mendukung kegiatan tera / tera ulang dalam hal mengawasi alat UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukur (SU), serta melaksanakan penyuluhan, pengamatan, dan penyidikan Kemetrologian.
- 3.1.2 Perindustrian
- 1) Kurangnya Fasilitas Merk/HAKI, SNI, Sertifikat Halal, *Nutrition Fact* Serta Desain Kemasan
Keberadaan IKM di pasar modern bertujuan agar produk IKM bisa dijual lebih mudah dan meluas. Dengan masuknya IKM ke pasar modern diharapkan IKM dapat lebih siap menghadapi persaingan pasar bebas, mulai dari kualitas sampai dengan kreativitas dalam pengolahan produk. Namun demikian, saat ini produk IKM yang telah masuk ke pasar modern dinilai masih kurang. Hal tersebut diiringi dengan masih kurangnya fasilitas Merk/HAKI, SNI, sertifikat halal, *nutrition fact*, serta desain kemasan.
 - 2) Masih Kecilnya Pertumbuhan IKM
Industri kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Meningkatnya pertumbuhan IKM diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah. Namun demikian, Pertumbuhan industri kecil di Kabupaten Magetan pada tahun 2017-2021 masih relatif rendah dan mengalami penurunan karena dampak pandemic covid 19.
 - 3) Masih Banyaknya IKM yang Belum Mendapatkan Pembinaan untuk Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Produktivitas industri kecil dan menengah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dari kemampuan teknologi industri. Teknologi yang ada saat ini dapat meningkatkan hasil produksi sehingga produktivitas industri kecil dan menengah dapat meningkat. Meskipun memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan produktivitas IKM di Kabupaten Magetan, saat ini masih cukup banyak IKM yang belum mendapatkan pembinaan untuk peningkatan kemampuan teknologi industri.
 - 4) Masih Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM
Fasilitas sarana dan prasarana produksi juga memiliki andil dalam produktivitas industri kecil. Dengan sarana dan prasarana yang memadai produksi dari industri kecil dapat lebih tinggi dari sebelumnya, Namun demikian, saat ini fasilitas sarana dan prasarana produksi bagi industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Magetan dinilai masih kurang.
 - 5) Masih belum adanya Data base IKM (jumlah, jenis komoditi, lokasi, produksi, dan lain sebagainya)
 - 6) Belum adanya kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan lainnya
 - 7) Belum adanya lokasi dan sarana dan prasana sebagai Kawasan Peruntukan Industri

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	1.1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan
		1.2	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1	Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin dan Rentan
		3.2	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah
4	Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	4.1	Terjaganya Keseimbangan Ekosistem
		4.2	Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan Yang Layak
		4.3	Berkurangnya Resiko Bencana Daerah
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	5.1	Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Managemen Pemerintahan
		5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Transparan
		5.3	Meningkatnya Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN
		5.4	Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		5.5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan maka berperan mendukung tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN		URUSAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	Perindustrian dan Perdagangan
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	Perdagangan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 SEKTOR INDUSTRI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- 1. Pembangunan SDM;

2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

A. Arah dan Kebijakan Industri Nasional

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

Agenda 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Arah Kebijakan yaitu

1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
 - 4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) mengembangkan industri halal.
2. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan;

- 2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
- 3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
- 4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata;
- 5) reformasi fiskal; dan
- 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Agenda 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan: Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industry.
2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional.

Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;
7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu: 1. industri makanan dan minuman; 2. industri tekstil dan busana; 3. industri otomotif; 4. industri kimia; dan 5. industri elektronika.

Pada bidang pengembangan iklim industri telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan pengelolaan lingkungan yang baik.
2. Penyusunan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM Kementerian Perindustrian tentang peningkatan efektivitas pengembangan IKM melalui pendekatan satu desa satu produk (one village one product – OVOP). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/2007

Pada Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M.IND/PER/4/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang telah disosialisasikan dan diterapkan di Instansi.

3.3.2 SEKTOR PERDAGANGAN

Dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, RPJMN 2020-2024 sebagai landasan utama pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan telah menuangkan 5 (lima) Arah Presiden yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan. Arah kebijakan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ada 3, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
2. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
3. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Arah pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pengembangan perdagangan dalam negeri terdiri dari lima bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui penyempurnaan berbagai kebijakan terkait distribusi komoditi di dalam negeri, peningkatan efektivitas monitoring stok dan harga bahan pokok, ketersediaan data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat, serta stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN.
- b. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan melalui studi pengembangan sistem logistik nasional, fasilitasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan dan pengembangan sistem informasi sarana logistik perdagangan, penyusunan dan pengembangan kebijakan dan peningkatan pembinaan serta fasilitasi revitalisasi pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing pasar rakyat, dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan khususnya daerahdaerah perbatasan dan daerah tertinggal/terpencil dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan.
- c. Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan melalui berbagai penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang usaha perdagangan, rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik, rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional, dan pembinaan pelaku usaha di bidang perdagangan.
- d. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan promosi makanan dan minuman

sehat nusantara sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri.

e. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan fokus kegiatan pada peningkatan kualitas logistik daerah, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan iklim usaha dan pengembangan pasar domestik daerah melalui kegiatan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok, pemetaan sarana distribusi perdagangan dan pelaku jasa logistik di daerah, sosialisasi dan harmonisasi kebijakan pembinaan usaha, pembinaan usaha kecil dan menengah, fasilitasi pasar murah, perlindungan konsumen di daerah, Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah, dan penggunaan pasar lelang di daerah.

Outcome yang diharapkan dari pengembangan perdagangan dalam negeri adalah:

- (i). Mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok;
- (ii). Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- (iii). Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan.

Adanya arahan arahan terkait peningkatan kinerja perdagangan dalam negeri dari dokumen RPJM Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024, menjadi landasan dalam menyusun arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk 5 tahun ke depan.

3.3.3 Telaahan Renstra Disperindag Prov

Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, sasaran dan indikator target dari tujuan dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

a. Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | 2021 Rancangan Awal Rencana Strategis Perubahan 2019-2024 40 Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan dan efektifitas hasil pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja. Aspek pemerataan dan penciptaan lapangan kerja ini diwujudkan dalam prioritas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan pengembangan industri berbasis agro. Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Jawa Timur merupakan IKM. Pengembangan industri berbasis agro dimaksudkan agar industrialisasi memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

b. Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri Pada bidang industri, kemandirian ekonomi diwujudkan dengan mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada bidang perdagangan, kemandirian tersebut diupayakan melalui penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kerjasama perdagangan dengan provinsi-provinsi lain melalui pembukaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Sampai tahun 2013, telah dibuka 26 KPD di berbagai provinsi mitra.

c. Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi Daya saing sektor industri dan perdagangan Jawa Timur harus terus ditingkatkan mengingat sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah semakin tidak dapat dibatasi oleh hambatan-hambatan

non-teknis. Keunggulan kompetitif dan komparatif dengan demikian menjadi kunci keberhasilan Jawa Timur dalam integrasi ekonomi global.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi local agribisnis, industry dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas :

1. Pengembangan agropolitan hortikultura;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
3. Pengembangan sentra industry;
4. Penataan kawasan wisata;
5. Penetapan kawasan lindung;
6. Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;
7. Pengembangan pusat kegiatan;
8. Pengembangan prasarana wilayah; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
10. Pengembangan LIK 2

Kawasan industri adalah kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan kesediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur, perkembangan wilayah, industri menurut investasi, jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.

- Industri besar berupa industri gula dengan dukungan budidaya tebu meliputi :
 - a. Pabrik Gula Redjosari berada di Kecamatan Kawedanan ; dan
 - b. Pabrik Gula Purwodadie berada di Kecamatan Karangrejo
- Industri menengah berupa industri kulit meliputi :
 - a. Kecamatan Magetan
 - b. Kecamatan Ngariboyo
- Industri kecil dan rumah tangga terdiri atas :
 - a. Industri batik meliputi:
 1. Industri batik Sidomukti di Kecamatan Ploasan
 2. Industri batik Pragak berada di Kecamatan Parang
 3. Industri batik Pojok berada di Kecamatan Nguntoronadi
 4. Industri batik Kepolorejo berada di Kecamatan Magetan
 5. Industri batik Kepuhrejo berada di Kecamatan Takeran
 6. Industri batik Gonggang berada di Kecamatan Poncol
 7. Industri batik Kembangan berada di Kecamatan Sukomoro
 - b. Industri kerajinan genteng meliputi:
 1. Kecamatan Maospati
 2. Kecamatan Karas
 3. Kecamatan Barat
 4. Kecamatan Kawedanan
 5. Kecamatan Bendo

6. Kecamatan Sukomoro
 7. Kecamatan Ngariboyo
- c. Industri kerajinan batubata meliputi :
1. Kecamatan Maospati
 2. Kecamatan Karas
 3. Kecamatan Barat
 4. Kecamatan Kawedanan
 5. Kecamatan Bendo
 6. Kecamatan Sukomoro
 7. Kecamatan Ngariboyo
- d. Industri kerajinan gerabah meliputi :
1. Kecamatan Kawedanan
 2. Kecamatan Lembeyan
 3. Kecamatan Parang
- Sentra industri kecil meliputi :
- a. Sentra kerajinan kulit berada di Kecamatan Magetan dan Ngariboyo
 - b. Sentra kerajinan bambu berada di Kecamatan Magetan
 - c. Sentra kerajinan gamelan berada di Kecamatan Karangrejo
 - d. Sentra makanan khas Magetan berada di Kecamatan Magetan
 - e. Industri ayam panggang Gandu berada di Kecamatan Karangrejo
 - f. Sentra kerajinan batik Sidomukti berada di Kecamatan Plaosan
- Kawasan peruntukan pengembangan sektor informal terdiri atas :
- a. Penyediaan ruang kegiatan sektor informal atau pedagang kaki lima dalam kawasan perkotaan
 - b. Penataan dan revitalisasi kawasan pedagang kaki lima pada pusat kegiatan perkotaan dan ruas jalan

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2018-2023, **Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Magetan.** Indikator-indikator SDGs dengan tanda (*) adalah indikator yang sesuai dengan indikator global.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
	9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategi

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan.

1. Era revolusi industri ke-4 (Industry 4.0) akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot semua serba *Internet of/for Things*, dan *masih sangat kecilnya pengetahuan dan kesiapan industry kita* berinovasi menyesuaikan dengan era indutri 4.0
2. Perlunya peningkatan SDM (pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan termasuk penguasaan iptek) bagi pengusaha IKM, UKM dan IRT sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi/dalam mengelola usahanya.
3. Masih perlunya Pengembangan Industri kecil penunjang Pariwisata dengan fokus pada kemampuan pengembangan desain produk. (desain belum up date atau belum mengikuti perkembangan dan belum rapi).
4. Masih rendahnya kemampuan penerapan teknologi industry terutama industry kecil di kabupaten magetan mengakibatkan kurang bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain
5. Pembangunan sentra – sentra ekonomi/penumbuhan usaha baru agar memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya.
6. Membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa dana maupun berupa peralatan supaya tepat sasaran dan tidak terjadi pemasalahan ketika akan memberi bantuan
7. Masih perlunya Penataan, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Industri kecil dan menengah utamanya industri unggulan yang dimiliki Kab. Magetan yaitu Industri kecil pengolahan kulit menjadi industri unggulan dan memiliki keterkaitan proses hulu hilir indusri, dimana Industri kecil penyamakan kulit sebagai industri hulunya dan industri kecil kerajinan kulit sebagai industri hilirnya.
8. Ipal mengolahan Limbah Industri Penyamakan Kulit belum memadai sehingga sangat mencemari dan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup (Ancaman pencemaran lingkungan dari industri kulit)
9. Pemilihan lokasi realokasi LIK 2 yang masih terkendala pemilihan lokasi dan pembebasan lahan.
10. Fasilitasi kepada IKM dan UKM tentang adanya pameran - pameran, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi IKM, baik pameran yang diadakan di Kab. Magetan maupun diluar Kab. Magetan
11. Pembangunan dan rehabilitasi pasar – pasar milik Pemkab sehingga memberi kenyamanan bagi pedagang dan pembeli ketika bertransaksi
12. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menjamin barang dagangannya layak konsumsi sehingga konsumen terjamin

keamanannya.

13. Masih rendahnya kemampuan Pedagang kaki Lima dan Asongan untuk berdagang sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Masih diperlukan pendampingan atau bimbingan terkait digital marketing bagi IKM ataupun pelaku usaha perdagangan
15. Perlu dilakukan sosialisasi tertib ukur sesuai dengan undang undang no 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal kepada pemilik UTP

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan RPD Tahun 2024-2026 selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T.C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2024-2026

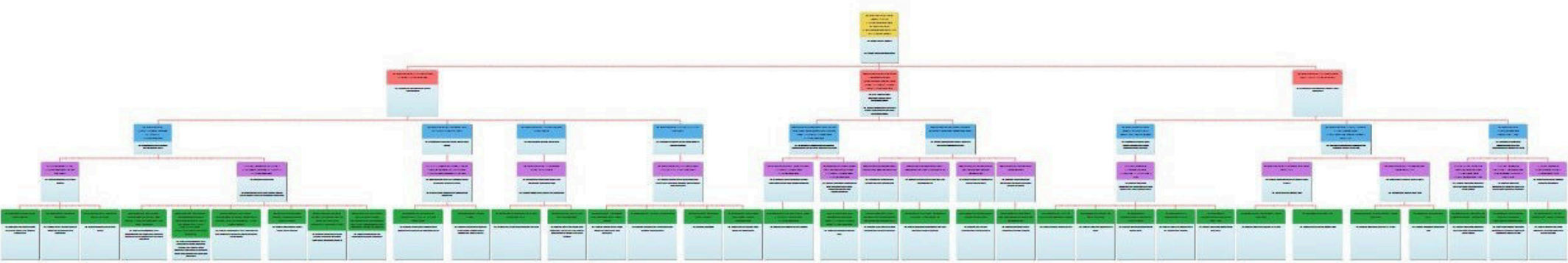
No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah			1.1	PDRB sektor perdagangan	2,527,602,65 Juta Rupiah	2,637,306,77 Juta Rupiah	2,747,010,89 Juta Rupiah
				1.2	PDRB sector Industri	919.090,12 Juta Rupiah	962.770,45 Juta Rupiah	1.006.450,78Juta Rupiah
		1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	1.1.1	Persestase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,15%	7,16%	7,17%
		2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2.1.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,200 %	0,201 %	0,202 %
		3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.1.1	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,78	84,79	84,80
				3.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.75	79,90	80

4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah

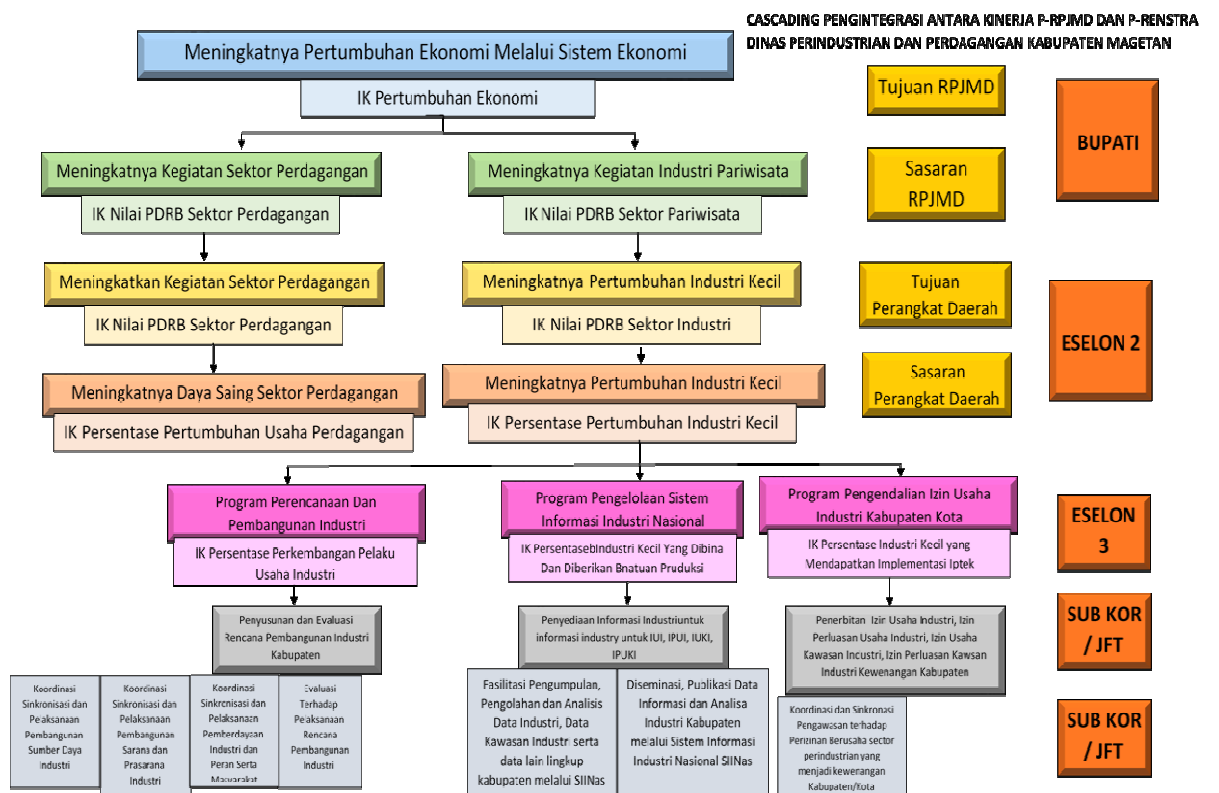
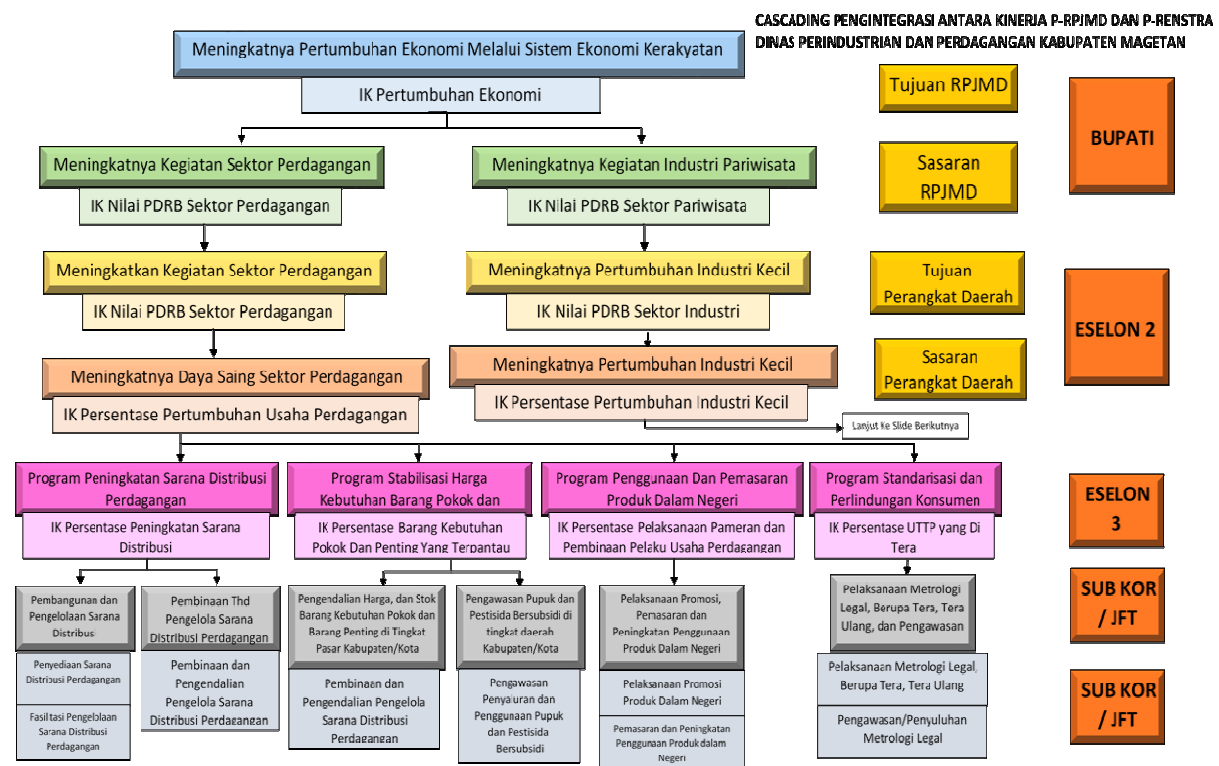
- a. Pohon kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten untuk lebih detailnya bisa dibuka pada link dibawah ini:

https://si-ksatria.magetan.go.id/view-pohon-kinerja-opddinas-perindustrian-dan-perdagangan/?key_sakip=MTc0MDU3NTU2NTAwMDM0YzZjNDdmYzNlMGE0ZmY1Nzh1OTk1ZDg5Y2IzNTk4MTc0MDU3NTU2NTAwMDM0YzZjNDdmYzNlMGE0ZmY1Nzh1OTk1ZDg5Y2IzNTk4&page_id=972&id_skpd=2241&id=306&id_jadwal=6&private=1

Pohon Kinerja
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RPD (2024 - 2026)



b. Cascading digunakan sebagai metode untuk menyebarkan dan menghubungkan tujuan strategis yang terdefinisi dalam pohon kinerja ke tingkat yang lebih rendah dalam perangkat daerah. Cascading Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten adalah sebagai berikut:



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi

- 1 Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional
- 2 Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan
- 3 Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang
- 4 Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan
- 5 Membina PK5 dan Asongan

5.2. Kebijakan

- 1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
- 2 Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
- 3 Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
- 4 Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
- 5 Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
- 6 Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
- 7 Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan
- 8 Memberikan Pembinaan dan Bantuan sarana perdagangan kepada PK5 dan Asongan.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-2026

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah	1.1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	1.1.1	Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
						1.1.1.2	Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
				1.1.2	Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan	1.1.2.1	Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
				1.1.3	Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang	1.1.3.1	Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
				1.1.4	Membina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.1.4.1	Memberikan Pembinaan dan Bantuan Sarana perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2.1.1	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil

						2.1.1.2	Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
						2.1.1.3	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan
	1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.1.1	Meminimalkan kesenjangan antara tingkat layanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan harapan dan keinginan stakeholder	3.1.1.1	Meningkatkan Kualitas SDM	
						3.1.1.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada table T-C.27 berikut ini:

TABEL T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2024-2026																
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %		75	181,000,000	75	199,100,000	75	219,010,000	75	599,110,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
Indikator Tujuan 1. PDRB sektor perdagangan	Indikator Sasaran 1. Persestase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin %		75	15,500,000	75	17,050,000	75	18,755,000	75	51,305,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.02.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dokumen		1	15,500,000	1	17,050,000	1	18,755,000	3	51,305,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG %		75	15,000,000	75	16,500,000	75	18,150,000	75	49,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.02.2.02.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau dokumen		1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	3	49,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW %		75	15,500,000	75	17,050,000	75	18,755,000	75	51,305,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri dokumen		1	15,500,000	1	17,050,000	1	18,755,000	3	51,305,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %		75	135,000,000	75	148,500,000	75	163,350,000	75	446,850,000	DINAS PERINDUS TRI AN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.02.2.06.1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Laporan		8	85,000,000	8	93,500,000	8	102,850,000	24	281,350,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.06.3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Laporan		2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,500,000	6	165,500,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %		75	181,000,000	75	199,100,000	75	219,010,000	75	599,110,000	DINAS PERINDUS TRI AN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin %		75	15,500,000	75	17,050,000	75	18,755,000	75	51,305,000	DINAS PERINDUS TRI AN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.02.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dokumen		1	8,000,000	1	8,800,000	1	9,680,000	3	26,480,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.01.2	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik dokumen		1	7,500,000	1	8,250,000	1	9,075,000	3	24,825,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG %		75	15,000,000	75	16,500,000	75	18,150,000	75	49,650,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.02.2.02.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang dokumen		1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	3	49,650,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW %		75	15,500,000	75	17,050,000	75	18,755,000	75	51,305,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri dokumen		1	8,000,000	1	8,800,000	1	9,680,000	3	26,480,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik dokumen		1	7,500,000	1	8,250,000	1	9,075,000	3	24,825,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman berakohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik %		75	15,500,000	75	17,050,000	75	18,755,000	75	51,305,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.02.2.05.1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen		8	8,000,000	8	8,800,000	8	9,680,000	24	26,480,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.05.2	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen		2	7,500,000	2	8,250,000	2	9,075,000	6	24,825,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %		75	112,000,000	75	123,200,000	75	135,520,000	75	370,720,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.06.1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Laporan		8	62,000,000	8	68,200,000	8	75,020,000	24	205,220,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.06.3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Laporan		8	50,000,000	8	55,000,000	8	60,500,000	24	165,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal %		50	7,500,000	50	8,250,000	50	9,075,000	50	24,825,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.02.2.07.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Dokumen		1	7,500,000	1	8,250,000	1	9,075,000	3	24,825,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi %		85	5,792,087,000	85	6,371,295,700	85	7,008,425,270	85	19,171,807,970	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan %		85		85		85		85			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi %		85	5,724,587,000	85	6,297,045,700	85	6,926,750,270	85	18,948,382,970	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit		4	5,049,587,000	4	5,554,545,700	4	6,110,000,270	12	16,714,132,970	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.2.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit		21	675,000,000	21	742,500,000	21	816,750,000	21	2,234,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.03. 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan %		85	67,500,000	85	74,250,000	85	81,675,000	85	223,425,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.03. 2.02.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dokumen		1	67,500,000	1	74,250,000	1	81,675,000	3	223,425,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.0 3	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi %		85	5,792,087,000	85	6,371,295,700	85	7,008,425,270	85	19,171,807,970	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan %		85		85		85		85			
		3.30.03. 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi %		85	5,724,587,000	85	6,297,045,700	85	6,926,750,270	85	18,948,382,970	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.03. 2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit		2	5,049,587,000	2	5,554,545,700	2	6,110,000,270	6	16,714,132,970	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03. 2.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit		21	675,000,000	21	742,500,000	21	816,750,000	21	2,234,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03. 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan %		85	67,500,000	85	74,250,000	85	81,675,000	85	223,425,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.03. 2.02.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dokumen		3	67,500,000	3	74,250,000	3	81,675,000	9	223,425,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau %		100	162,000,000	100	178,200,000	100	196,020,000	100	536,220,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau %		100	114,500,000	100	125,950,000	100	138,545,000	100	378,995,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.04.2.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Laporan		3	20,000,000	3	22,000,000	3	24,200,000	9	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Laporan		52	4,500,000	52	4,950,000	52	5,445,000	156	14,895,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Laporan		3	90,000,000	3	99,000,000	3	108,900,000	9	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau Laporan		5	47,500,000	5	52,250,000	5	57,475,000	15	157,225,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGA N	
		3.30.04.2.03.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 % Laporan		5	47,500,000	5	52,250,000	5	57,475,000	15	157,225,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau %		100	162,000,000	100	178,200,000	100	196,020,000	100	536,220,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota %		75	7,500,000	75	8,250,000	75	9,075,000	75	24,825,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Laporan		1	7,500,000	1	8,250,000	1	9,075,000	3	24,825,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota %		100	107,000,000	100	117,700,000	100	129,470,000	100	354,170,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Laporan		3	20,000,000	3	22,000,000	3	24,200,000	9	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Laporan		52	4,500,000	52	4,950,000	52	5,445,000	156	14,895,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Laporan		4	82,500,000	4	90,750,000	4	99,825,000	12	273,075,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau Laporan		5	47,500,000	5	52,250,000	5	57,475,000	15	157,225,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.03.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 % Laporan		3	47,500,000	3	52,250,000	3	57,475,000	15	157,225,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaksanaan Pameran %		90	135,000,000	90	148,500,000	90	163,350,000	90	446,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran %		90	135,000,000	90	148,500,000	90	163,350,000	90	446,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01.3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Pelaku Usaha		12	90,000,000	12	99,000,000	15	108,900,000	39	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01.4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha		5	45,000,000	5	49,500,000	5	54,450,000	15	148,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaksanaan Pameran %		90	135,000,000	90	148,500,000	90	163,350,000	90	446,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran %		90	135,000,000	90	148,500,000	90	163,350,000	90	446,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01.3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Pelaku Usaha		12	90,000,000	12	99,000,000	12	108,900,000	36	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.2.01.4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha		5	45,000,000	5	49,500,000	5	54,450,000	15	148,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang ditera %		100	135,000,000	100	148,500,000	100	163,350,000	100	446,850,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
		3.30.06. 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera %		100	135,000,000	100	148,500,000	100	163,350,000	100	446,850,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN	
		3.30.06. 2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang unit		15,000	90,000,000	17,000	99,000,000	19,000	108,900,000	51,000	297,900,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
		3.30.06. 2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina orang		300	45,000,000	325	49,500,000	350	54,450,000	975	148,950,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang ditera %		100	135,000,000	100	148,500,000	100	163,350,000	100	446,850,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
		3.30.06. 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera %		100	135,000,000	100	148,500,000	100	163,350,000	100	446,850,000	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN	
		3.30.06. 2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang unit		20,000	90,000,000	20,000	99,000,000	20,000	108,900,000	60,000	297,900,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	
		3.30.06. 2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina orang		300	45,000,000	325	49,500,000	350	54,450,000	975	148,950,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri %		80	265,000,000	80	291,500,000	80	320,650,000	80	612,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan %		80	265,000,000	80	291,500,000	80	320,650,000	80	612,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM		15	230,000,000	15	253,000,000	20	278,300,000	50	531,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi UMKM		25	35,000,000	25	38,500,000	30	42,350,000	80	80,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri %		80	265,000,000	80	291,500,000	80	320,650,000	80	877,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri %		80	265,000,000	80	291,500,000	80	320,650,000	80	877,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM		15	230,000,000	15	253,000,000	20	278,300,000	50	761,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.2.01.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi UMKM		20	35,000,000	20	38,500,000	25	42,350,000	65	115,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Indikator Tujuan 2. PDRB sektor industri	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro %		90	1,396,600,000	90	1,689,886,000	90	2,142,510,788	90	5,228,996,788	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase perkembangan pelaku usaha industri non agro %		90		90		90		90			
	Indikator Sasaran 2. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan industri non agro %		90	1,396,600,000	90	1,689,886,000	90	2,142,510,788	90	5,228,996,788	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peralatan									0		
		3.31.02.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dokumen		4	125,000,000	4	151,250,000	4	189,062,500	12	465,312,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dokumen		4	570,000,000	4	689,700,000	4	892,278,288	12	2,151,978,288	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen		4	656,600,000	4	794,486,000	4	993,107,500	12	2,444,193,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Dokumen		1	45,000,000	1	54,450,000	1	68,062,500	3	167,512,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro % Persentase perkembangan pelaku usaha industri non agro %		90	1,396,600,000	90	1,689,886,000	90	2,142,510,778	90	5,228,996,778	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan industri non agro %		90	1,396,600,000	90	1,689,886,000	90	2,142,510,778	90	5,228,996,778	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peralatan									0		
		3.31.02.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dokumen		2	125,000,000	2	151,250,000	2	189,062,500	6	465,312,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dokumen		4	550,000,000	4	667,700,000	4	871,378,278	12	2,089,078,278	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen		4	636,600,000	4	772,486,000	4	965,607,500	12	2,374,693,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Dokumen		1	45,000,000	1	54,450,000	1	68,062,500	3	167,512,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.2.01.8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Dokumen		4	40,000,000	4	44,000,000	4	48,400,000	12	132,400,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan %		90	90,000,000	90	99,000,000	90	108,900,000	90	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan %		90	90,000,000	90	99,000,000	90	108,900,000	90	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten /Kota dokumen		2	90,000,000	2	99,000,000	2	108,900,000	6	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan %		90	90,000,000	90	99,000,000	90	108,900,000	90	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan %		90	90,000,000	90	99,000,000	90	108,900,000	90	297,900,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab. / Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen		1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	3	148,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.2.01.4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu		1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	3	148,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi %		90	295,000,000	90	324,500,000	90	356,950,000	90	976,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi %		90		90		90		90			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan non agro yang dibina dan diberikan bantuan produksi %		90	295,000,000	90	324,500,000	90	356,950,000	90	976,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dokumen		2	270,000,000	2	297,000,000	2	326,700,000	6	893,700,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas dokumen		1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	3	82,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi %		90	295,000,000	90	324,500,000	90	356,950,000	90	976,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi %		90		90		90		90			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan non agro yang dibina dan diberikan bantuan produksi %		90	295,000,000	90	324,500,000	90	356,950,000	90	976,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dokumen		2	270,000,000	2	297,000,000	2	326,700,000	6	893,700,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas dokumen		1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	3	82,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag Indeks		77.78	7,701,292,735	77.79	8,471,422,009	77.8	9,318,564,209	77.8	25,491,278,953	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Indikator Sasaran 3.1 Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.31.01.2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket		97	326,935,000	97	359,628,500	97	395,591,350	291	1,082,154,850	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Indikator Sasaran 3.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.31.01.2.01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		4	25,000,000	4	27,500,000	4	30,250,000	12	82,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket		6	92,335,000	6	101,568,500	6	111,725,350	18	305,628,850	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	9	49,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket		12	25,000,000	12	27,500,000	12	30,250,000	36	82,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket		3	19,600,000	3	21,560,000	3	23,716,000	9	64,876,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen		45	30,000,000	45	33,000,000	45	36,300,000	135	99,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan		24	120,000,000	24	132,000,000	24	145,200,000	72	397,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		60	2,675,500,000	60	2,943,050,000	60	3,237,355,000	180	8,855,905,000	DINAS PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N	
		3.31.01. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan		36	255,500,000	36	281,050,000	36	309,155,000	108	845,705,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01. 2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan laporan		12	20,000,000	12	22,000,000	12	24,200,000	36	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan		12	2,400,000,000	12	2,640,000,000	12	2,904,000,000	36	7,944,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		8	139,600,000	8	153,560,000	8	168,916,000	24	462,076,000	DINAS PERINDUSTR IAN DAN PERDAGANG AN	
		3.31.01. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajakny a Unit		1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	3	148,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01. 2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinanny a Unit		5	34,600,000	5	38,060,000	5	41,866,000	15	114,526,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01. 2.09.9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny a yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		2	60,000,000	2	66,000,000	2	72,600,000	6	198,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		52	35,000,000	52	38,500,000	52	42,350,000	156	115,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang		50	15,000,000	50	16,500,000	50	18,150,000	150	49,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang		2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	6	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		13	33,000,000	13	36,300,000	13	39,930,000	39	109,230,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen		7	10,000,000	7	11,000,000	7	12,100,000	21	33,100,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan		6	23,000,000	6	25,300,000	6	27,830,000	18	76,130,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		100	3,928,605,235	100	4,321,465,759	100	4,753,612,334	100	13,003,683,328	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang /Bulan		64	3,923,605,235	64	4,315,965,759	64	4,747,562,334	192	12,987,133,328	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD laporan		2	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	6	16,550,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dokumen		26	562,652,500	26	618,917,750	26	680,809,525	78	1,862,379,775	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah dokumen		2	542,652,500	2	596,917,750	2	656,609,525	6	1,796,179,775	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dokumen		24	20,000,000	24	22,000,000	24	24,200,000	72	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag Indeks		77.78	7,701,292,735	77.78	8,471,422,009	77.8	9,318,564,209	77.8	25,491,278,953	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		13	33,000,000	13	36,300,000	13	39,930,000	39	109,230,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen		7	10,000,000	7	11,000,000	7	12,100,000	21	33,100,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan		6	23,000,000	6	25,300,000	6	27,830,000	18	76,130,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		100	3,928,605,235	100	4,321,465,759	100	4,753,612,334	100	13,003,683,328	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang /Bulan		64	3,923,605,235	64	4,315,965,759	64	4,747,562,334	192	12,987,133,328	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD laporan		2	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	6	16,550,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dokumen		26	562,652,500	26	618,917,750	26	680,809,525	78	1,862,379,775	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah dokumen		2	542,652,500	2	596,917,750	2	656,609,525	6	1,796,179,775	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dokumen		24	20,000,000	24	22,000,000	24	24,200,000	72	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		64	35,000,000	64	38,500,000	64	42,350,000	192	115,850,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang		62	15,000,000	62	16,500,000	62	18,150,000	186	49,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang		2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	6	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket		92	326,935,000	92	359,628,500	92	395,591,350	276	1,082,154,850	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		4	25,000,000	4	27,500,000	4	30,250,000	12	82,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket		6	92,335,000	6	101,568,500	6	111,725,350	18	305,628,850	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	9	49,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3,31,01.2.01.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket		12	25,000,000	12	27,500,000	12	30,250,000	36	82,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.01.2.01.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket		3	19,600,000	3	21,560,000	3	23,716,000	9	64,876,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen		40	30,000,000	40	33,000,000	40	36,300,000	120	99,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.01.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan		24	120,000,000	24	132,000,000	24	145,200,000	72	397,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		60	2,675,500,000	60	2,943,050,000	60	3,237,355,000	180	8,855,905,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan		36	255,500,000	36	281,050,000	36	309,155,000	108	845,705,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan laporan		12	20,000,000	12	22,000,000	12	24,200,000	36	66,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan		12	2,400,000,000	12	2,640,000,000	12	2,904,000,000	36	7,944,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseli ne (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		7	139,600,000	7	153,560,000	7	168,916,000	21	462,076,000	DINAS PERINDUSTR IAN DAN PERDAGANG AN	
		3.31.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biay a Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya Unit		1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	3	148,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biay a Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinanny a Unit		5	34,600,000	5	38,060,000	5	41,866,000	15	114,526,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.01.2.09.9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	3	198,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
T total						16,152,979,735		17,921,903,709		19,997,730,267		53,807,613,711			
T total						16,152,979,735		17,921,903,709		19,997,730,257		54,072,613,701			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 :

Dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui system ekonomi kerakyatan

Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sector unggulan Kabupaten Magetan

Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas masyarakat pendapatan rendah

Tabel T-C-28
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Magetan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9
1	Perdagangan					
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2.318.350,39	2.527.602,65	2.637.306,77	2.747.010,89	2.747.010,89
	Persentase Pasar Kondisi Baik	77	78	80	82	82
	Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah	0,886	0,91	0,92	0,93	0,92
	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	3,04	7,15	7,16	7,17	7,17
	Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya	9,7	9,7	9,8	9,9	9,9
	Persentase Produk IKM yang Masuk Pasar Modern	51	50	55	60	60
	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	0	31,64	31,65	31,66	31,66
2	Perindustrian					

	Nilai PDRB Sektor Industri	0	919.090,12	962.770,45	1.006.450,78	1.006.450,78
	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan	0,07	0,200	0,201	0,202	0,202
	Nilai Produksi industri kecil	760,639,000	760,639,000	765,639,000	770,639,000	770,639,000

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha perdagangan	1. Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$	Laporan Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar	Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Pasar dan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	$\frac{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - 1} \times 100\%$	Laporan Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan dan Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka	Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, Kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka dan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 - 2026 ini merupakan dasar pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan tiga tahunan SKPD oleh karena itu setiap bidang ,sub bidang dan staf dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif,efisien,transparan,akuntabel dan partisipasif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dalam program –program yang tertuang dalam Renstra Dinas perindustrian dan Perdagangan ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan penting untuk memperhatikan keterpaduan dan siskronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1.Seluruh aparatur dinas Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk melaksanakan Program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam renstra dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan sebaik-baiknya
- 2.Renstra Dinas Perindustrian dan perdagangan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja tahunan (RENJA) Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Magetan.

Magetan, Juli 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN


SUCIPTO, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009